

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Y, Z. 2015. *Manajemen Komunikasi : Filosofi, Konsep, dan Aplikasi* Pustaka Setia. Bandung.
- DeLone, W.H., dan McLean, E.R. 2003. *Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable. Information Systems Research*, Pp. 60-95.
- Dwiyanto. 2010. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hartono, Bambang. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Laudon, K, C dan Laudon, J, P. 2013. *Management Information Systems : Managing the Digital Firm, 12th edition*. Pearson Education Limited.
- _____, 2008. *Sistem Informasi Manajemen* Terjemahan Chriswan Sungkono dan Machmudin Eka P. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Lie Oen Hock. 1961. *Lembaga Catatan Sipil*. Keng, Po, Jakarta.
- Maruapey, M. Husein. 2019. *Urgensi Tata Kelola Inovasi Perekaman Data dan Dokumen Kependudukan*. *Jurnal Governansi*, 5(1): 55-69. https://ojs.unida.ac.id/JGS/article/view/1705/pdf_1.
- Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*.
- Muttaqin, M Naufal., B Indah, Rahmawati, D Citrawati, A Pebiana, NH Ahmad, H maulana, D Rahmayanti, D Nuryatman, SPS Sandroto, MP Fisabilillah, dan GG Seran. 2020. *Service Quality and its Determinants of Population Administration Service in Bogor Regency. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 54(5): 109-118 ISSN 2307-4531
- Notoatmodjo. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Eko. 2008. *Sistem Informasi Manajemen: Konsep, Aplikasi, & Perkembanganya*. Yogyakarta: Penerbit Andi

- Nugroho, Puguh Adi dan Hardi Warsono. 2012. *Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang*. *Journal of Public Policy and Management Review*. Volume 1 Nomor 2.
- Norkholifah, E.S., R. Akhmad Munjin., dan Ginung Pratidina. 2021. *Kinerja Pembuatan Akta Kelahiran*. *Jurnal Governansi*, 7(2): 143-148. <https://ojs.unida.ac.id/JGS/article/view/3183/2659>.
- Prasojo, Lantip Diat. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. UNY Press. Yogyakarta.
- Ridwanullah M, AA Utami, C Wahyudin, S Nurpadillah, F Pratama, H Rukmana, FM Fadhlurrohman, DT Apriadi, Hoerunisa, I Lira, GG Seran. 2019. *Implementation of E-Governance to Improve the Civil Administration Service Quality in Public Sector*. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 48(3): 168-178 ISSN 2307-4531
- Saputra, Yoga. 2016. *Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur*. Universitas Terbuka, Jakarta. <http://repository.ut.ac.id/6772/>.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutabri, Tata. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- _____. 2016. *Sistem Informasi Manajemen*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Turban, Efraim & Linda V. 2010. *Information Technology for Management*. Terjemahan Coki Siadari. Edisi ketujuh. Asia: John Willey & Sons.

Sumber Lain:

- Indische Staatsregeling Pasal 163 yang Mengatur Penggolongan Penduduk yang Ada di Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2021. *Distribusi Penduduk Indonesia Per Juni 2021: Jabar Terbanyak, Kaltara Paling Sedikit*. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2022. *SIAK Terpusat Jadikan Dukcapil Makin Transparan dan Akuntabel*. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1040/siak-terpusat-jadikan-dukcapil-makin-transparan-dan-akuntabel>.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Presidium Kabinet Ampera Nomor 31/U/UN/12/66 tentang Dihapuskannya Penggolongan Penduduk yang Ada di Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.